

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

**MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)**



**PERUMDAM TIRTA KENCANA
KOTA SAMARINDA
2020**

Alamat : Jl Tirta Kencana No.1 (75121)

Telp : (0541) 741460 - 741590

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH



PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA 2020

Alamat : Jl Tirta Kencana No.1 (75121)

Telp : (0541) 741460 - 741590

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK/WBBM DI UNIT KERJA
PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA**

A. DASAR

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Rencana kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM.

C. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

I. Manajemen Perubahan

Indikator :

a. Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Pembentukan tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2. Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas.

b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM harus disediakan dan memadai.

- c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :
1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani mengacu pada target yang direncanakan.
 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.
- d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 2. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan zona integritas.
 3. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir.
 4. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda terdiri dari komponen pengungkit manajemen perubahan :

Target :

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran dan pegawai PER Unit Pelayanan Wilayah dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja Perumda Tirta Kencana Kota Samarinda sesuai usulan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
4. Mengurangi penyalahgunaan prosedur yang akan berakibat merugikan masyarakat.

II. Penataan Tatalaksana

Indikator :

- a. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Pelayanan :
- Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti :
1. Penyusunan SOP kegiatan utama yang mengacu kepada bisnis proses Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda
 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerapan SOP
 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi/Perbaikan SOP

b. Sistem Kepegawaian (Simpeg)

Pengukuran Indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, yaitu:

1. Penyusunan sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi.
2. Penyusunan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi.
3. Penyusunan sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.
4. Keterbukaan informasi publik.
5. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik.
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Target :

1. Meningkatnya Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen perusahaan di zona integritas menuju WBK/WBBM.
2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen perusahaan di zona integritas menuju WBK/WBBM.

III. Penataan Sistem Manajemen SDM

Indikator:

- a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Pengukuran Indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
 1. Membuat Rencana Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan perbagian unit kerja dari jumlah pelanggan yang terlayani.
 2. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja.
 3. Menerapkan Monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.
- b. Pola Mutasi Internal
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
 1. Penyusunan kebijakan pola mutasi internal.
 2. Penerapan kebijakan pola mutasi internal.
 3. Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal.
- c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
 1. Penganggaran kegiatan pengembangan profesi (Diklat).
 2. Terdapat kesempatan/ hak bagian pegawai diunit kerja untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi dilainnya.
 3. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi.
- d. Penetapan Kinerja Individu.
 1. Penerapan penetapan kinerja individu.
 2. Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja level diatasnya.
 3. Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodik.

4. Hasil penilaian kinerja Individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
- e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik Perilaku Pegawai
Pengukuran indikator dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan seperti pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku telah dilaksanakan/ diimplementasikan.
- f. Sistem Informasi kepegawaian
Pemutakhiran Informasi kepegawaian dilakukan secara berkala.

Target :

1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
4. Meningkatkan efektifitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
5. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator :

- a. Keterlibatan Pimpinan.
 1. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan.
 2. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja.
 3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.
- b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
 1. Penyusunan dokumen perencanaan.
 2. Dokumen perencanaan berorientasi hasil.
 3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).
 4. Indikator Kinerja memiliki kriteria SMART.
 5. Penyusunan Laporan Kinerja.
 6. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

Target :

1. Meningkatkan kinerja pada Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.
2. Meningkatkan akuntabilitas instansi perusahaan.

V. Penguatan Pengawasan

Indikator :

- a. Pengendalian Gratifikasi
 1. Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi.
 2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
- b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Perusahaan
 1. Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja.
 2. Melakukan penilaian risiko atas unit kerja terkait.
 3. Melakukan Sosialisasi ke pihak terkait.
- c. Pengaduan Masyarakat
 1. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik.
 2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat.
 3. Melakukan Monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat.
 4. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.
- d. Whistle Blowing System/ seseorang yang memberikan sesuatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak korupsi.
 1. Menerapkan Whistle Blowing System.
 2. Mengevaluasi penerapan Whistle Blowing System
 3. Menindaklanjuti evaluasi penerapan Whistle Blowing System.
- e. Penanganan Benturan Kepentingan
 1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.
 2. Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan.
 3. Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan.
 4. Mengevaluasi Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.
 5. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.

Target :

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan.
2. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan Keuangan Negara.
3. Meningkatkan efektifitas pengelolaan Anggaran Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator :

- a. Standar Pelayanan
 1. Penyusunan Standar Pelayanan di Unit Kerja Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.
 2. Penyusunan SOP bagi Standar Pelayanan.
 3. Melakukan reuiu dan perbaikan atas Standar Pelayanan dan SOP.

b. Budaya Pelayanan Prima.

1. Melakukan Sosialisasi/Pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima.
2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui Link, Web Perumdam.
3. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.

c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan.

1. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan.
2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka.
3. Melakukan tindak lanjut atas hasil Survey Kepuasan Masyarakat.

Target :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, mudah dan transparan).
2. Mengusahakan unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan.
3. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Samarinda, 02 Juni 2020

Direktur Utama

Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda



NOR WAHID HASYIM, ST., MM